

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana mulai tanggal 9 Oktober 2017 hingga 11 November 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Bagiana memberikan gambaran terkait dengan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang Apoteker di Apotek adalah melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat.
2. Mengetahui bahwa seorang Apoteker harus dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas, dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan sesama apoteker tenaga kesehatan yang lain.
3. Mengetahui bahwa seorang Apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik untuk menunjang dalam melakukan pengembangan apotek antara lain memiliki kemampuan dalam manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola sumber daya Apotek.
4. Mengetahui bahwa seorang Apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian yaitu dengan melakukan analisis resep, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.

5. Dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan melakukan KIE.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang rasional.
2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien lebih mengerti cara penggunaan obat yang diperoleh dengan benar dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
3. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya berikut obat-obat yang sudah di gunakan, di sinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005. Manajemen Farmasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anonim. 2016. Informasi Spesialite Obat Vol. 50. Jakarta.
- Hartini, Y.S, dan Sulasmono. 2006. Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/ MENKES/ SK/ VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ MENKES/ SK/ X/ 2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Lacy et al. 2009. Drug Information Handbook 17th Ed. Ohio: Hudson.
- McEvoy G, et al. 2011. AHFS : Drug Information Essentials. Maryland: Bethesda.
- MIMS Indonesia. 2016. MIMS Petunjuk Konsultasi Ed 3. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/ Per/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/MENKES/ PER/ X/ 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012. *Manajemen Farmasi Edisi 3*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Shann, F. 2014. *Drug Doses 16th Ed*. Australia: Parkville.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 6355/ Dirjen/ SK/ 1969 tentang Obat Bebas Terbatas.